

STRUKTUR DAN PERAN ANEKA LEMBAGA DALAM RANTAI PASOK TERNAK DAN DAGING SAPI POTONG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

*(STRUCTURE AND ROLE OF OF VARIOUS INSTITUTIONS IN SUPPLY CHAIN OF CATTLE
AND BEEF COMODITIES IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE)*

Arnoldus Keban*, Sirilus S. Niron, Ulrikus R. Lole

Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto Penfui, Kupang 85001

*Correspondence author, email: arnolduskeban@yahoo.com

ABSTRAK

Struktur dan peran setiap lembaga yang spesifik dalam manajemen rantai pasok pemasaran lokal sapi perlu diketahui secara detail dan komprehensif. Tujuan: 1) menguraikan berbagai peran kelembagaan dalam manajemen rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten dan Kota Kupang NTT; dan 2) merumuskan upaya perbaikan kinerja kelembagaan rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten Kupang NTT. Survei terhadap sejumlah lembaga terkait dalam manajemen rantai pasok ternak sapi potong secara komprehensif, mencakup seluruh *stakeholder* yaitu: petani, pedagang ternak, pejalag, pedagang daging, pasar hewan, RPH, karantina hewan, ekspedisi angkutan laut, dll. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, analisis biaya, keuntungan dan margin pemasaran masing-masing pelaku. Simpulan: 1) Peran pelaku/lembaga dalam rantai pasok ternak/daging sapi di Kabupaten Kupang perlahan mulai membentuk jaringan solid sesuai peran para pihak. Namun masih ada persoalan dalam kelancaran komunikasi, interaksi dalam bertransaksi pada tiap titik rantai pasok, terutama titik antara peternak dan pedagang desa terkait penentuan harga; dan 2) kinerja kelembagaan dalam rantai pasok ternak/daging sapi secara keseluruhan untuk menjamin kepentingan seluruh stakeholder belum optimal, khususnya terkait dengan: cara transaksi kelompok, harga patokan, pengendalian penjualan betina bibit, pencegahan pemotongan betina produktif, karantina ketat, dan ketersediaan kapal berkapasitas besar.

Kata kunci: struktur, peran, lembaga, rantai pasok, pemasaran, sapi potong

ABSTRACT

The structure and role of each specific institution in the supply chain management of local cattle marketing need to be known in detail and comprehensively. The objectives were: 1) to describe the various institutional roles in the supply chain management of livestock and beef in Kupang District and Kupang City, NTT; and 2) to formulate efforts to improve the institutional performance of the livestock and beef supply chain in Kupang District, NTT. Surveys of institutions related to supply chain management of beef cattle in a comprehensive manner, covering all stakeholders (farmers, livestock traders, butchers, meat traders, animal markets, slaughterhouses, animal quarantine, sea freight expeditions, etc.). Data were analyzed descriptively-qualitatively and quantitatively, analysis of costs, benefits and margin of each marketing actor. As conclusions were: 1) The role of institutions in the supply chain management of cattle / beef in Kupang Regency is slowly starting to form a solid network according to the roles of the parties. However, they still have problems in terms of smooth communication and interaction in transactions at each point of the supply chain, especially the point between farmers and village traders regarding price determination; and 2) the institutional performance of cattle/ beef supply chain as a whole to ensure the interests of all stakeholders not optimal yet, in particular related to improve the group transaction methods, benchmark prices, controlling the sale of young females, preventing the slaughter of productive females, strict quarantine, and the availability of large capacity livestock vessels.

Keywords: structure, institution, supply chain, marketing, beef cattle

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang cukup besar telah ikut

mengambil bagian dalam bisnis sapi potong, yang menjanjikan keuntungan finansial dan keuntungan sosial-budaya lainnya. Berbagai pihak berkepentingan (*stakeholder*) mengambil peran dalam penyediaan sarana produksi, produksi, industri, pemasaran, dan konsumsi berbagai produk olahan hasil ternak (konsumsi langsung maupun untuk kebutuhan lainnya) (Basuno 2004; Chopra 2006; Fatahilah et al 2010; Hariningsih 2012). Seiring berjalannya waktu, usaha sapi potong sudah mulai bergeser dari sifat *subsisten* (memenuhi kebutuhan sendiri) dan *social standing* (status/gengsi) ke sifat lebih komersial (*market oriented*) dengan memanfaatkan surplus produksi yang dapat dijual ke pasar (Lence et al 2007; Lole 2013; Priyanto 2011). Selanjutnya, Hadi (2012) dan Suryana (2008) menyatakan bahwa suatu produk pertanian yang mampu menjangkau pasar yang makin jauh ke hilir dalam struktur vertikal rantai pasok dan makin mendekati ke arah daerah pusat konsumen, maka akan mampu berkembang lebih cepat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan konsumen.

Populasi sapi NTT sekitar 1 juta ekor pada tahun 2019 (sekitar 4.3% dari populasi sapi nasional) dan menempati posisi kelima itu menunjukkan bahwa posisi dan peran NTT sangat penting dalam mendukung penyediaan daging sapi nasional. Apalagi secara nasional hingga saat ini masih memiliki impor yang cukup besar yaitu mencapai sekitar 35–40% dari kebutuhan daging nasional (Lole 2013). Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa tingkat kemampuan memasok ternak dan daging (ke pasar nasional dan lokal) masih memiliki kendala yang perlu diidentifikasi. Hal ini terlihat pada ketidاكلancaran atau kesulitan kegiatan pengumpulan ternak (*collecting*) dari desa-desa dalam upaya pemenuhan kuota untuk perdagangan antar-pulau setiap tahunnya (Arlina 1997; Budisantoso et al 2008; Hartati dan Lole 2016).

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data primer melalui wawancara pihak terkait melalui *indeep-interogation* pada 5 kecamatan contoh yaitu: Kecamatan Amfoang Selatan, Fatuleu, Kupang Timur, Sulamu, dan Amarasi Barat. Survai melalui wawancara (berpedoman kuisioner, *indepth interview*, PRA, dan FGD) terhadap sampel pada lokasi sampel. Data sekunder dari

Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi daging sapi (nasional dan lokal); kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemotongan, dan distribusi daging sapi ke pasar hingga konsumen akhir mengikuti suatu rangkaian peran kelembagaan dan kinerja manajemen rantai pasok (*supply chain management, SCM*) (Hadi 2012; Hayami et al 1987; Hosami 2014). Pada tingkat awal perdagangan (tingkat petani, pedagang desa dan pedagang kecamatan), struktur SCM itu berimpit antara pemasaran ternak untuk keperluan antar-pulau dan untuk keperluan produksi dan konsumsi lokal. Pada tingkat awal ini, rantai pasok mengalirkan berbagai jenis ternak hasil transaksi berupa ternak jantan (hasil penggemukan, bakalan, bibit muda, dan afkir) dan ternak betina (dewasa produktif, bibit muda, dan afkir). Selanjutnya pada tingkat akhir, rantai pasok terbagi menjadi dua jalur pasokan yaitu untuk jalur pemasaran antar-pulau (RPH luar NTT) dan jalur pemasaran lokal (RPH lokal dan pembibitan) (Hadi 2012; Van der Vorst 2006; Rachman 2016).

Bagaimana peran masing-masing lembaga yang spesifik dan fungsi manajemen rantai pasok pada kedua jalur pemasaran sapi (khususnya pemasaran lokal) perlu diketahui secara detail dan komprehensif. Dengan demikian, hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki peran kelembagaan dan sekaligus fungsinya dalam rangka pembangunan peternakan di NTT secara menyeluruh.

Penelitian bertujuan: 1) menguraikan berbagai peran aneka lembaga dalam rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten/Kota Kupang, Provinsi NTT; dan 2) merumuskan upaya perbaikan fungsi lembaga/kelembagaan rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten/Kota Kupang, Provinsi NTT.

Disnak, BPS Kabupaten/Kota Kupang, Pasar Hewan Lili, RPH Oeba/ Aldia, Karantina Hewan Tenau, Ekspedisi Angkutan Laut, Administrasi Pelabuhan. dan pihak terkait lainnya.

Survai terhadap berbagai pihak terkait perencanaan dan pengembangan usaha ternak dan hasil ternak sapi di tingkat Kabupaten/Kota Kupang, khususnya terkait

pada pemasaran hasil, pengolahan hasil, dan konsumsi. Responden di tingkat kabupaten/kota yaitu Disnak dan Bappeda, camat/kepala desa, LSM, koperasi, petani, pedagang (desa/kecamatan/kabupaten/antar pulau), pejabat, pemodal, lembaga keuangan, dan pihak lain (*key persons*). Oleh karena itu, digunakan pendekatan institusional dengan harapan dapat terjaring data yang lengkap.

Melalui kajian empirik-statistik digunakan pendekatan kuantitatif untuk memecahkan masalah, dilengkapi pendekatan deskriptif-kualitatif sesuai kebutuhan. Berbagai deskripsi

tentang struktur, peran, dan fungsi dari masing-masing lembaga dan individu/perusahaan yang berada dalam mata rantai pemasaran ternak sapi potong sebagai suatu manajemen rantai pasok (Preckel *et al* 2004; Marimin dan Maghfiroh 2011; Monczka *et al* 2011). Keunggulan dan kelemahan dari berbagai lembaga dan pihak terkait akan diuraikan dengan detail dan diharapkan dapat ditemukan upaya untuk memperbaiki peran dan fungsinya, yang terjalin dalam suatu sistem rantai pasok yang efisien dan efektif (Paul 2014; Saaty 2004).

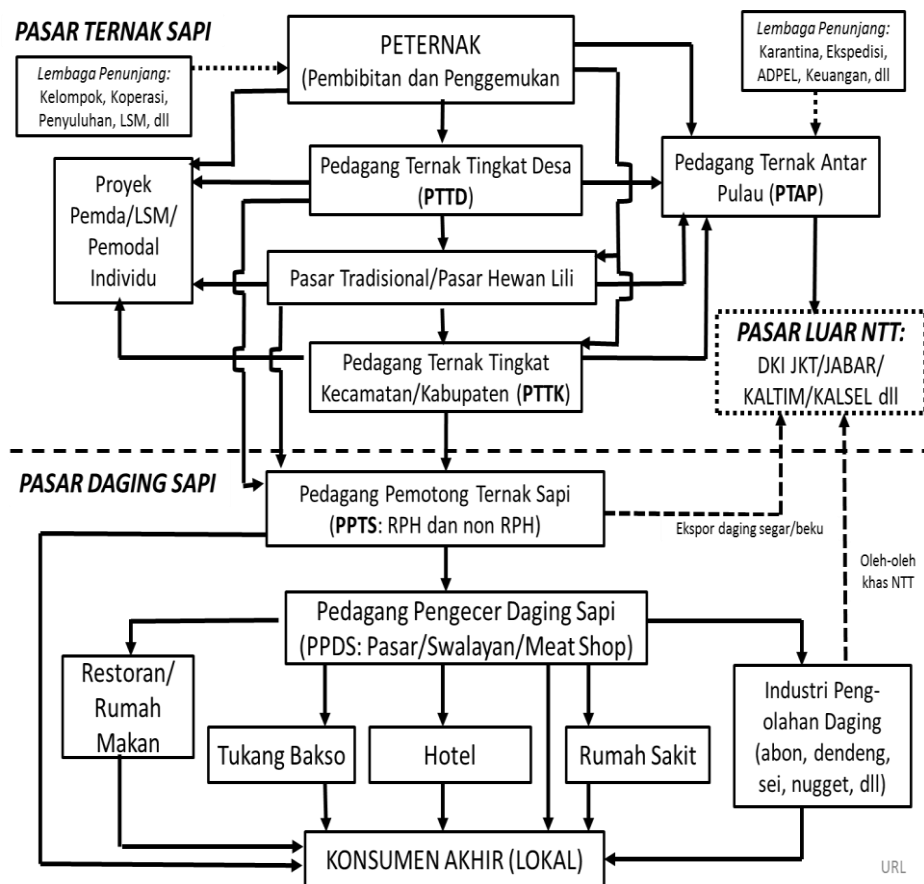
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Rantai Pasok

1. Struktur Vertikal Rantai Pasok

Secara umum, struktur vertikal rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten/ Kota Kupang ditunjukkan Gambar 1 (Lole 2013; Hadi 2012). Rantai pasok ternak sapi di Kabupaten Kupang dimulai dari peternak di desa sampai kepada pedagang pemotong sapi

untuk pemasaran lokal atau sampai kepada pedagang ternak antarpulau untuk ekspor. Sementara itu, untuk rantai pasok daging sapi segar dimulai dari pedagang pemotong atau pejabat ternak sapi (di RPH dan non RPH) sampai ke konsumen lokal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.



Gambar 1. Rantai Pasok Ternak dan Daging Sapi di Kabupaten/Kota Kupang

Umumnya, peternak menjual ternak sapi kepada pedagang ternak desa (PTTD), baik dihubungi petani ataupun didatangi PTTD, sehingga tempat transaksi terjadi di rumah atau kebun. Namun, sebagian kecil menjual di tempat lain (pasar biasa, pasar hewan, atau tempat tinggal pedagang). Data menunjukkan bahwa transaksi jual-beli sapi yang besar terjadi di Pasar Hewan Lili, dimana pelaku transaksi adalah: PTTD, pedagang ternak tingkat kecamatan/kabupaten (PTTK), pedagang ternak antar-pulau (PTAP), dan pedagang pemotong ternak sapi/pejagal (PPTS). Ternak sapi di Pasar Hewan Lili berasal dari 5 kabupaten yaitu Timor Tengah Selatan dan Kupang (paling dominan), serta Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka (jumlah sedikit karena jauh).

2. Pedagang Ternak Tingkat Desa (PTTD)

Di dalam pemasaran sapi, PTTD bertindak sebagai pengumpul di desanya atau desa tetangganya. PTTD ini akan menjual sapi kepada PTTK yang kemudian juga menjualnya di Pasar Hewan Lili. Pedagang ternak sapi di Kabupaten Kupang memperjualbelikan ternak sapi bali, karena disesuaikan dengan pasokan dan permintaan di wilayah ini. Pembayaran dalam transaksi jual-beli sapi dilakukan tunai (*cash and carry*), karena merupakan motivasi awal dari menjual sapi yaitu untuk mendapatkan uang tunai.

Penentuan harga sapi dalam transaksi jual-beli antara peternak dengan PTTD dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara penaksiran harga berdasarkan kondisi tubuh ternak sapi dan cara penimbangan ternak sapi lalu dihitung harganya. Keunggulan dan kelemahan dari kedua cara penentuan harga tersebut telah diuraikan pada bagian terdahulu (Lole 2013; Hadi 2012).

3. Pedagang Ternak Tingkat Kecamatan (PTTK)

Umumnya PTTK berdagang sapi untuk dipotong atau bibit/bakalan. Jumlah penjualan per PTTK per bulan untuk sapi yang dipotong dan sapi untuk bibit/bakalan relatif sama. Seperti pada PTTD, para PTTK memperjualbelikan sapi karena jumlah pasokan dan permintaan sapi. Permintaan sapi bakalan penggemukan lebih banyak sapi jantan daripada sapi betina, tetapi jumlah sapi yang dipotong lebih banyak sapi betina daripada sapi jantan. Adapun ternak sapi yang diperdagangkan berasal dari Belu, Malaka, TTU, TTS, dan Kupang (Kecamatan Amfoang,

Sulamu, Amarasi, dan Fatuleu) yang dibeli dari pedagang ternak desa. Pembayaran kepada PTTD dilakukan secara tunai (*cash and carry*).

4. Pedagang Pemotong Ternak Sapi (PPTS)

PPTS (pejagal) membeli sapi untuk dipotong dari PTTK di Pasar Hewan Lili. Sapi umumnya dari Kabupaten Kupang dan TTS (jarak 40–60 km). Harga sapi dengan berat hidup 300 kg atau berat daging 100 kg sekitar Rp 9 juta per ekor. Pedagang lebih suka menentukan harga berdasarkan taksiran berat daging yang akan dihasilkan, dan bukan berat hidup (Hadi 2012; Wiyatna 2007). Hal ini juga disebabkan oleh masih rusaknya timbangan di Pasar Lili. Pembayaran kepada PPTK juga dilakukan secara tunai (*cash and carry*).

5. Pedagang Pengecer Daging Sapi (PPDS)

PPDS menjual daging sapi pada pasar tradisional (Pasar Oeba, Naikoten, dan Oebobo) di Kota Kupang. PPDS membeli daging sapi seluruhnya dari PPTS/pejagal di RPH Oeba Kupang dan menjual di pasar tradisional. Daging segar berupa daging murni atau utuh (tidak tercampur jenis daging lain). Daging segar ada yang dibedakan menurut kategori dan ada yang tidak dibedakan (misalnya daging has dan daging paha) (Wiyatna 2007; Rachman 2016; Hodi *et al* 2011).

Ada juga sebagian daging segar/beku (serta hasil olahannya) yang dijual pada toko daging (meatshop/butcherry) di Kota Kupang seperti Toko Aldia dan lainnya. Namun, seluruh daging berasal dari RPH Aldia sendiri (di Desa Belo) dan merupakan daging murni serta dijual berdasarkan kategori/kualitas daging dengan harga berbeda. Toko ini sudah dijalankan 25 tahun (sejak 1995), dengan tingkat pemotongan 5–7 ekor per hari atau 160 ekor per bulan (pada awal usaha memotong 8 ekor sapi per bulan di RPH Oeba).

6. Pedagang Ternak Antar Pulau (PTAP)

Semua PTAP berkantor pusat di Kota Kupang, dan umumnya memiliki kandang penampungan sementara di Kabupaten Kupang sambil menunggu pengangkutan dengan kapal laut (kapal ternak atau modifikasi kapal barang). PTAP sudah berpengalaman puluhan tahun dalam perdagangan sapi. Umumnya sapi jantan penggemukan (paron) untuk dipotong (Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan) dan sebagian kecil sapi betina untuk

bibit (khusus ke Flores dan kabupaten lain di NTT).

Pembelian sapi oleh PTAP dari PTTK untuk tujuan ekspor sebulan terakhir 345 ekor dengan harga Rp9–10 juta per ekor untuk sapi paron dengan taksiran berat 275–300 kg. Ternak ini dijual ke Jawa dan Kalimantan menggunakan nama perusahaan dengan harga Rp32.500 per kg berat hidup. Biaya pengiriman Rp650.000–750.000 per ekor mulai dari Karantina Kupang sampai Samarinda/Banjarmasin atau Jakarta/Surabaya. Susut berat badan sapi selama perjalanan sampai ke pelabuhan tujuan sebesar 13–15%.

7. Proyek Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Selain transaksi jual-beli sapi paron antar para pedagang untuk tujuan pemotongan, ada pula transaksi jual-beli bibit dan bakalan untuk pembibitan dan penggemukan oleh berbagai kalangan, baik individual maupun institusional. Ada berbagai program dan proyek pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten), lembaga swadaya masyarakat (lokal, regional, nasional, dan internasional), koperasi/KUB, serta perusahaan swasta; yang mengembangkan sapi, baik untuk pembibitan maupun penggemukan.

B. Peran dan Fungsi Penyedia Jasa Penunjang

1. Pasar Hewan

Ternak sapi dipasarkan di pasar umum (jumlah kecil) dan pasar hewan (jumlah besar). Pasar hewan utama di NTT adalah Pasar Hewan Lili. Pasar beroperasi sekali per minggu, tetapi dalam praktiknya antara Rabu–Sabtu, dimana skala besar terjadi pada Kamis dan Jumat. Pada Rabu dan Kamis didominasi ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), sedangkan Jumat dan Sabtu didominasi ternak kecil (kambing, babi, dan anjing) dan unggas (ayam kampung). Daerah asal sapi adalah lima kabupaten yaitu Kupang (23%), TTS (57%), TTU (9%), Belu (5%), dan Malaka (6%).

Fasilitas penunjang: 1) kandang penampungan kapasitas 500 ekor; 2) timbangan

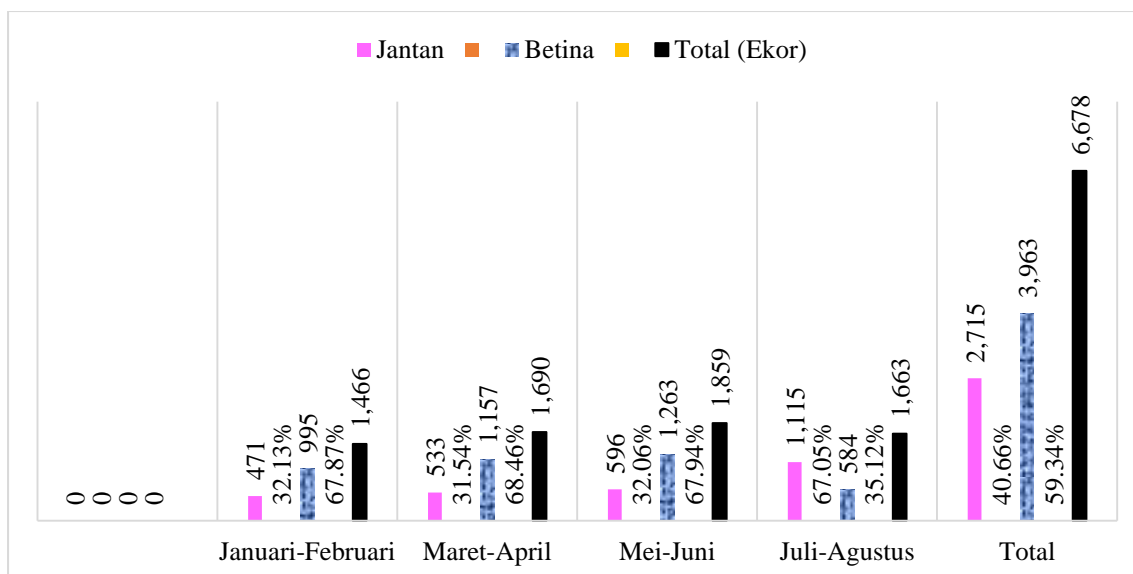
ternak, tetapi tidak berfungsi. Timbangan sangat bermanfaat bagi semua pihak (khususnya petani) untuk penentuan harga obyektif dan bisa mendapatkan keuntungan terbaik; 3) tempat bongkar-muat ternak; 4) tempat makan/minum ternak; dan 5) kantor. Fasilitas pendukung harus semakin baik dalam fungsinya sehingga menguntungkan semua pihak yang menggunakan jasa pasar ini, khususnya operasionalisasi timbangan dan penyediaan pakan/air minum.

Daerah tujuan pemasaran sapi dari Pasar Hewan Lili: Provinsi NTT 60% (Kota Kupang dan lain-lain) dan sisanya Kalimantan 20% dan Jakarta 20%. Ternak jantan penggemukan (paron) diperdagangkan antarpulau (ke Kalimantan Timur/Selatan dan Jakarta/Jawa Barat), sedangkan sapi betina umumnya dibeli untuk Rumah Potong Hewan Oeba/Aldia di Kota Kupang.

2. Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

RPH Oeba merupakan UPTD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Kupang). Lokasi RPH Oeba sekitar 10 m dari pemukiman dan 40 m dari Pasar Oeba. Kegiatan penciptaan nilai tambah (*value addition activities*) mulai terjadi di RPH yang mengubah ternak hidup menjadi daging dan hasil-hasil lainnya (berupa industri pengolahan produk ternak, baik *main product* maupun *by-product*). Jenis fasilitas di RPH: tempat bongkar/muat ternak, kandang penampungan ternak, ruang pemotongan (menyatu antara ruangan kotor, ruang bersih, ruang pelayuan, dan ruang cuci jeroan), alat transportasi daging, dan kantor RPH.

Jumlah pemotongan sapi di RPH Oeba 10.548 ekor (2019) dan 7.751 ekor (hingga September 2020). Jumlah pemotongan selama Januari–September 2019 sebanyak 7.734 ekor, yang berarti jumlah pemotongan selama Januari–September 2020 cukup stabil. Adapun jumlah PPTS yang memotong sapi di RPH ini adalah 16 orang.



Gambar 1 Jumlah pemotongan sapi menurut jenis kelamin di RPH Oeba, Kota Kupang, pada bulan Januari-Agustus 2020 (ekor). Sumber: RPH Oeba Kupang Oktober 2020

Pembangunan RPH Bimoku (pengganti RPH Oeba) dengan fasilitas lebih moderen dan kapasitas lebih besar sudah mendekati tahapan operasional. Saat ini masih menanti proses pengalihan pengelolaan kepada Pemda Kota Kupang sambil terus melengkapi berbagai fasilitas, termasuk penyediaan air dan listrik.

3. Balai Karantina Pertanian

Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang berlokasi 200 meter dari Pelabuhan Laut Tenau (Kota Kupang). Balai Karantina ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yaitu pengawasan lalu-lintas ternak antarpulau, baik yang masuk maupun keluar Provinsi NTT, khususnya di Kawasan Timor Barat.

Pengeluaran sapi melalui Balai Karantina tahun 2019 sesuai kuota adalah 69.650 ekor (frekuensi pengapalan 928 kali), sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan September mencapai 58.746 ekor (frekuensi pengapalan 652 kali). Jika dibandingkan Januari–September 2019 sebesar 48.712 ekor, maka pengapalan untuk periode yang sama tahun 2020 meningkat sekitar 21%. Jumlah pengeluaran lebih banyak pada musim kemarau, yaitu bulan Agustus–Oktober sesuai jumlah pasokan sapi yang besar pada periode ini.

Pemantauan penyakit di Balai Karantina perlu terus dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi dan melayani setiap ekor ternak dan setiap pelanggan yang menggunakan jasa Balai Karantina. Hal ini termasuk penyediaan tempat penampungan, pelayanan kesehatan, pakan dan

air, dan sebagainya. Izin ekspor sapi ke luar NTT disesuaikan dengan kuota yang disepakati antara Pemda NTT dengan beberapa Pemda penerima ternak sapi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan permintaan, penawaran, dan harga yang wajar (Lole 2013; Herera 2007; MacArthur 2004; Arlina 1997)

4. Ekspedisi Angkutan Laut

Ekspedisi laut tugasnya melayani jasa pengurusan angkutan sapi dari Pelabuhan Tenau (Kupang) hingga ke tempat tujuan. Di Kupang hanya ada 2 pemilik jasa ekspedisi laut pengangkut ternak, yang selalu bekerja sama setiap melakukan pengapalan sapi. Perusahaan ekspedisi laut tersebut tidak memiliki kapal sendiri. Selama beberapa bulan terakhir (Agustus sampai Oktober 2020), pengiriman sapi ke Jawa dan Kalimantan. Pengapalan menggunakan Kapal Hewan Camara Nusantara dan kapal barang *charteran* sekali jalan (berangkat saja) yang sudah dimodifikasi. Masih dibutuhkan kapal hewan dengan kapasitas lebih besar dengan biaya yang lebih terjangkau. Kapal hewan khusus mampu menurunkan angka susut badan menjadi 8–10% (dengan kapal barang modifikasi memiliki angka susut sekitar 13–15%).

5. Administrator Pelabuhan (ADPEL)

Kantor Administrator Pelabuhan (ADPEL) Kupang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ADPEL bertanggung jawab atas keselamatan

kapal dan isi kapal (barang dan penumpang) dari pelabuhan keberangkatan sampai dengan pelabuhan kedatangan.

Sehubungan pengangkutan ternak hidup antarpulau, pihak ADPEL menginginkan tersedia kapal khusus ternak dengan kapasitas memadai. Oleh karena itu, ADPEL mensyaratkan jika menggunakan kapal barang maka harus dimodifikasi dengan membuat kandang sementara, dan kapal hanya berisi ternak saja (tidak boleh dicampur dengan barang lain dan penumpang).

Menurut ADPEL Tenau, jumlah kapal keluar dan masuk NTT untuk mengangkut sapi sebanyak 94 buah, yaitu: 5 buah kapal hewan

(5.3%), 80 buah (85.1%) kapal motor (KM) dan 9 buah (9.6%) kapal layar motor (KLM). Berat kotor kapal berkisar 30–1.600 GT dengan jumlah sapi yang dimuat berkisar 10–650 ekor sekali angkut. Jurusan kapal bervariasi yaitu Kalimantan (Samarinda dan Banjarmasin), Sulawesi (Makassar, Tuju-tuju, Sinjai, dan Kendari), serta Jawa (Jakarta dan Surabaya). Semua kapal tersebut mempunyai jadwal keberangkatan dan kedatangan. Pada dasarnya, ketersediaan kapal diyakini cukup untuk melayani angkutan ternak sapi dari Provinsi NTT ke daerah-daerah lain.

SIMPULAN

1. Peran kelembagaan dalam rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten/Kota Kupang secara perlahan mulai membentuk jaringan yang solid sesuai peran dari masing-masing pihak. Namun masih ada persoalan dalam lancarnya komunikasi dan interaksi dalam bertransaksi pada setiap titik rantai pasok, terlebih pada titik pertama antara peternak dan pedagang ternak tingkat desa (PTTD), khususnya terkait penentuan harga ternak.
2. Kinerja kelembagaan rantai pasok ternak/daging sapi secara keseluruhan untuk menjamin kepentingan seluruh stakeholder masih belum optimal, Hal ini ditunjukkan beberapa hal, yaitu: perbaikan cara transaksi berkelompok, harga patokan pemerintah, pengendalian penjualan betina bibit, dan pencegahan pemotongan betina produktif, karantina yang ketat, dan ketersediaan kapal ternak berkapasitas besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina F. 1997. Kajian kebijakan pemerintah mengenai kuota pengeluaran ternak terhadap perkembangan populasi sapi bali dan analisis sapi bali bibit di Provinsi Nusa Tenggara Barat. [tesis]. Bogor: SPs IPB.
- Basuno E. 2004. Mengembalikan status wilayah Nusa Tenggara sebagai gudang ternak. *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol 2 No 4, Desember 2004: 354-368.
- Budisantoso E, Triastono J, Fernandez P, Marawali H, Deblitz C. 2008. *Strategies to Reduce Weight Loss in Inter-Island Trade*. ACIAR SMAR 2007/202. Australia Indonesia Partnership.
- Chopra S, Meindl. 2006. *Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Fatahilah YH, Marimin, Harianto. 2010. Performance analysis of supply chain for beef cattle: Case study at PT Kariyana Gita Utama, Jakarta. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*. 20(3):193–205
- Hadi PU. 2012. Manajemen rantai pasok ternak dan daging Sapi Sapi di Nusa Tenggara Timur. Di dalam: Lokollo EM, editor. *Bunga Rampai Rantai Pasok Komoditas Pertanian Indonesia*. Bogor: IPB Pr.
- Hariningsih E. 2012. Peran teknologi informasi bagi hubungan inter organisasional dalam supply chain management system. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*. 1(1):27–36
- Hartati E, Lole UR. 2016. Feasibility study pembangunan dan pengembangan pabrik pakan skala kecil di Provinsi NTT. Kupang: Disperindag NTT
- Hayami Y, Kawagoe T, Morooka Y, Siregar M. 1987. *Agricultural Marketing and Processing in Upland Java A Perspective from a Sunda Village*. Bogor: The CPGRT Centre.
- Herera GE. 2007. Dynamic use of closures and imperfectly enforced quotas in a metapopulation. *American Journal of Agric*

- Economics*. Malden: Feb 2007. 89(1):176–189.
- Hoddi AH, Rombe MB, Fahrul. 2011. Analisis pendapatan peternakan sapi potong di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (Revenue Analysis Cattle Ranch In Sub Tanete Rilau Barru). *Agribisnis* (10) 3:98109.
- Hosami GA. 2014. Supply chain management scenario in India. *International Journal of Reasearch in Management and Business Studies*. 1(3):18–22
- Lence SH, Murette S, Hayes DJ, Foster W. 2007. Collective marketing arrangements for geographically differentiated agricultural products: Welfare impacts and policy implications. *American Journal of Agricultural Economics*. Malden: Nov 2007. 89(4); 947–957.
- Lole UR. 2013. Dampak kebijakan produksi dan perdagangan sapi terhadap produksi sapi dan kesejahteraan petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur [disertasi]. Bogor: SPs IPB.
- MacArthur M. 2004. Cattle industry slowly considers national quota system. *Western Producer*. Saskatoon: Jul 1, 2004. 82(26):15.
- Marimin, N Maghfiroh. 2011. Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Bogor: IPB Press
- Monczka R, Trent RJ, Handfield RB. 2011. Purchasing and Suplly Chain Management 5th Edition. Ohio, South-Western (US): Cengage Learning
- Paul J. 2014. Panduan Penerapan Transformasi Rantai Suplai dengan Model SCOR. Nurul R, Zalsa AD, Wahyudi H (editor). Jakarta: Penerbit PPM
- Preckel PV, Gray A, Boehlje M, Kim S. 2004. Risk and value chains: participant sharing of risk and rewards. *Journal Chain and Network Services*. 4 (1): 25–32.
- Priyanto D. 2011. Strategi pengembangan usaha ternak sapi potong dalam mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014. *Jurnal Litbang Pertanian*. 30(3):108–116
- Rachman NM. 2016. Efisiensi jaringan distribusi rantai pasok daging sapi di Kota Bogor. [tesis]. Bogor: SPs IPB
- Saaty TL. 2004. Decicion making-the Analytical Hierarchy and Network Processe (AHP/ANP). *Journal of Systems Science and System Engineering*. 13(1):1–35
- Suryana. 2008. Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan. *Jurnal Litbang Pertanian*. 28(1):29–37
- Van der Vorst JGAJ. 2006. Performance measurement in agrifood supply chain networks: an overview. In: Quantifying the Agri-food Aupply Chain 13–24. Wegenigen (NL): Logistic and Operation Research Group.
- Wiyatna MF. 2007. Perbandingan indek perdagangan sapi-sapi Indonesia (sapi bali, madura, dan PO) dengan sapi australian commercial cross (ACC). *Jurnal Ilmu Ternak*. 7(1):22–25.